

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Presentasi diri anggota legislatif perempuan di DPRD Provinsi Jawa Barat merupakan aspek penting dalam menjalankan fungsi peran mereka sebagai wakil rakyat. Sebagai figur publik di tingkat provinsi, anggota legislatif perempuan diharapkan bisa menampilkan citra diri yang profesional, positif, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Presentasi diri tersebut tercermin melalui cara berbicara dalam forum resmi, sikap dalam kegiatan politik, penampilan di ruang publik, serta pola komunikasi yang digunakan dalam berbagai kondisi. Dalam lingkungan politik yang masih didominasi oleh laki-laki, perempuan anggota legislatif menghadapi tantangan untuk menunjukkan kapasitas dan integritasnya sekaligus menyesuaikan diri dengan norma serta harapan sosial yang berkaitan dengan identitas gender mereka. Oleh karena itu, presentasi diri berperan tidak hanya sebagai alat komunikasi politik, namun juga sebagai strategi penting untuk membangun kepercayaan, legitimasi, dan mempertahankan posisi mereka dalam dunia politik.

Untuk menganalisis cara pembentukan dan pelaksanaan presentasi diri, penelitian ini menggunakan perspektif dramaturgi yang diperkenalkan oleh Erving Goffman 1959. Perspektif ini memandang kehidupan sosial sebagai sebuah pertunjukan di mana individu berfungsi sebagai pengisi peran atau aktor yang berupaya menciptakan kesan tertentu di hadapan audiensnya.

Berdasarkan perspektif dramaturgi yang diperkenalkan oleh Erving Goffman melihat kehidupan sosial sebagai sebuah pertunjukan, di mana individu bertindak

sebagai aktor yang menunjukkan diri mereka di depan orang lain untuk menciptakan kesan tertentu. Dalam perspektif ini, interaksi sosial tidak bersifat netral, melainkan diatur melalui strategi perilaku, bahasa, dan penampilan yang disesuaikan berdasarkan situasi dan audiens yang ada.

Goffman memperkenalkan dramaturgi pertama kali dalam kajian sosial psikologis dan sosiologi melalui bukunya, "*The Presentation of Self In Everyday Life*". Digali dari beragam perilaku interaksi yang manusia lakukan dalam pertunjukan kehidupan sehari-hari yang menampilkan diri sendiri dalam cara yang sama dengan cara seorang aktor menampilkan karakter orang lain dalam sebuah pertunjukan drama, cara yang sama ini mengacu kepada kesamaan yang berarti ada pertunjukan yang ditampilkan.

Dramaturgi menyadari bahwa dalam hubungan antar individu terdapat "perjanjian" mengenai tingkah laku yang disetujui, yang dapat membawa kepada hasil akhir dari tujuan interaksi sosial tersebut. Manusia menciptakan sebuah mekanisme tersendiri, dimana dengan memainkan peran tersebut mereka dapat tampil dengan berbagai peran tertentu.

Fokus dari pendekatan dramaturgi adalah bukan tindakan yang dilakukan orang, bukan keinginan mereka, atau alasan di balik tindakan tersebut, melainkan cara mereka melakukannya. Goffman berpendapat bahwa saat berinteraksi, individu ingin menampilkan citra diri yang akan dianggap positif oleh orang lain. Ia menyebut usaha tersebut sebagai "pengelolaan kesan" (*impression management*), yang merujuk pada berbagai metode yang digunakan oleh para aktor untuk

membentuk impresi tertentu dalam konteks tertentu demi mencapai tujuan yang spesifik.

Dengan konsep dramaturgi ini membantu memahami bagaimana individu yang berada dalam posisi publik menciptakan serta mengelola citra diri mereka dalam kehidupan sehari-hari. Setiap aktor sosial tidak hanya berperan, tetapi juga secara sadar atau tidak sadar mengelola cara mereka berbicara, bersikap, dan berinteraksi agar dapat diterima dan dipercaya oleh lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, presentasi diri menjadi bagian penting dari proses interaksi sosial, terutama bagi individu yang menjalankan peran penting di ranah publik.

Goffman membagi ruang interaksi sosial ke dalam dua wilayah utama, yaitu panggung depan (*front stage*) dan panggung belakang (*back stage*). Panggung depan merupakan ruang publik tempat individu menjalankan peran formal sesuai dengan ekspektasi sosial, sedangkan panggung belakang menjadi ruang pribadi di mana individu dapat melepaskan peran formal tersebut dan menampilkan identitas personalnya secara lebih bebas.

Kerangka dramaturgi menjadi sangat relevan ketika diterapkan dalam konteks kehidupan politik, khususnya bagi perempuan yang berperan sebagai anggota legislatif. Dalam dunia politik, presentasi diri perempuan tidak terjadi hanya dalam satu ruang, melainkan tersebar ke berbagai ruang sosial yang berbeda, yakni ruang publik dan ruang pribadi. Sebagai figur publik, perempuan anggota legislatif berada dalam posisi yang menuntut mereka untuk menunjukkan citra diri tertentu demi memperoleh pengakuan dan kepercayaan masyarakat.

Ruang publik atau panggung depan (*front stage*), merupakan wilayah di mana perempuan anggota legislatif menampilkan dirinya sebagai politisi dan wakil rakyat di hadapan publik. Dalam ruang ini, mereka dituntut untuk tampil profesional, meyakinkan, dan sesuai dengan harapan masyarakat terhadap seorang anggota legislatif. Penampilan yang terjaga, cara berbicara yang teratur, serta sikap yang penuh keyakinan menjadi bagian dari strategi membangun citra politik yang positif, sekaligus menunjukkan kapasitas dan kemampuan mereka sebagai wakil rakyat.

Sebaliknya, Panggung belakang (*back stage*) yaitu ruang yang bersifat lebih pribadi dan tidak sepenuhnya dapat diakses publik. Di ruang ini, perempuan anggota legislatif dapat melepaskan peran formalnya dan mengekspresikan identitas personal, seperti sebagai ibu rumah tangga, istri, anggota keluarga, atau individu biasa. Panggung belakang (*back stage*) juga menjadi ruang untuk mengekspresikan perasaan, kelelahan, dan refleksi diri yang tidak selalu dapat ditampilkan di ruang publik. Selain menjalani peran domestik, banyak perempuan legislatif juga aktif sebagai aktivis sosial, pembina komunitas, atau tokoh perempuan di lingkungan sekitar mereka, yang turut membentuk pengalaman dan pandangan hidup.

Hubungan antara *front stage* dan *back stage* tidak selalu terpisah secara jelas, melainkan saling memengaruhi. Pengalaman personal di ruang belakang, misalnya peran sebagai ibu atau pengelola rumah tangga, sering membentuk kepedulian mereka terhadap isu-isu sosial tertentu, yang kemudian terlihat dalam sikap dan pandangan politik di parlemen. Di sisi lain, tekanan dan tuntutan yang mereka hadapi di panggung depan sebagai politisi sering kali terbawa dalam kehidupan

pribadi mereka. Situasi ini memperlihatkan kompleksitas dari peran ganda yang harus dijalani perempuan dalam dunia politik.

Dengan demikian, teori dramaturgi memberikan kerangka yang relevan untuk memahami bagaimana perempuan anggota legislatif membangun dan mengelola citra diri di tengah tuntutan politik dan sosial yang kompleks. Berdasarkan pendekatan ini, penelitian mengenai presentasi diri anggota legislatif perempuan menjadi penting untuk dikaji secara mendalam melalui metode kualitatif, karena pendekatan tersebut memungkinkan peneliti menggali pengalaman subjektif, makna interaksi sosial, serta dinamika identitas yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif. Presentasi diri merupakan pengertian dari sebuah tindakan mengekspresikan diri yang dibuat bertujuan menciptakan kesan yang menyenangkan atau yang berkaitan dengan sesuatu yang ideal menurut seseorang.

Presentasi diri dapat diartikan sebagai upaya aktif individu dalam menciptakan dan menjaga citra tertentu di depan orang lain. Individu tidak pernah sepenuhnya menunjukkan jati dirinya, tetapi selalu menyesuaikan perilaku, cara berbicara, serta penampilan mereka sesuai dengan apa yang diharapkan dalam konteks sosial. Dalam konteks profesi, pentingnya presentasi diri semakin meningkat karena berhubungan langsung dengan kepercayaan, legitimasi, dan kredibilitas. Individu yang berada dalam posisi publik diharapkan tidak hanya memiliki keahlian teknis, tetapi juga dapat menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan profesionalisme, tanggung jawab, dan integritas.

Menurut Goffman, presentasi diri adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh individu untuk menciptakan pemahaman tentang situasi dan identitas sosial para

pelaku. Pemahaman mengenai situasi ini berdampak pada berbagai interaksi yang dianggap sesuai maupun tidak sesuai bagi para pelaku dalam konteks tertentu. (Mulyana, 2008).

Dalam dunia politik, presentasi diri memiliki peran yang sangat strategis. Aktor politik tidak hanya dinilai dari kebijakan yang dihasilkan, tetapi juga dari cara mereka menampilkan diri kepada publik.

Bahasa yang digunakan, perilaku, gerakan tubuh, serta metode berkomunikasi dengan publik menjadi elemen dari strategi untuk menciptakan kepercayaan dan pengakuan. Oleh karena itu, presentasi diri dapat dipandang sebagai modal simbolik yang berdampak pada keberhasilan aktor politik dalam menjalankan perannya.

Bagi perempuan yang terlibat dalam dunia politik, presentasi diri memiliki kompleksitas tersendiri terutama bagi perempuan yang telah menjadi bagian dari anggota legislatif, tantangan tidak hanya berhenti pada proses pemilihan serta tidak hanya menghadapi tuntutan profesional sebagai wakil rakyat, tetapi juga berhadapan dengan konstruksi sosial dan budaya yang masih memosisikan politik sebagai ranah yang didominasi oleh laki-laki. Kondisi ini menuntut perempuan untuk lebih cermat dalam mengelola citra diri agar dapat diterima, diakui, dan memiliki pengaruh dalam lingkungan politik. Cara perempuan berbicara, bersikap, serta membangun komunikasi politik dengan konstituen, media, dan elite politik lainnya sangat menentukan bagaimana mereka dipersepsikan oleh publik dengan menampilkan diri sering kali dinilai lebih spesifik karena masih adanya stigma dan ekspektasi gender di masyarakat. Cara perempuan yang berperan sebagai anggota

legislatif menampilkan diri mereka juga dipengaruhi oleh latar belakang sosial, pengalaman hidup, dan berbagai peran lain yang mereka jalani, seperti ibu rumah tangga, istri, aktivis sosial, atau tokoh masyarakat. Identitas-identitas ini saling terkait dan membentuk cara kepemimpinan serta pandangan politik mereka.

Seorang anggota legislatif perempuan memiliki cirikhas tersendiri saat berbicara maupun bertindak, pastinya sebagai wakil rakyat seorang anggota legislatif perlu memiliki karakter baik agar memberi citra yang baik pada rakyat. Rakyat mempunyai harapan yang amat besar pada mereka yang berada di lembaga legislatif, sebab pada dasarnya wakil rakyat harus bisa menyerap aspirasi-aspirasi dari rakyat. Dalam hal ini, presentasi diri berfungsi sebagai jembatan antara identitas pribadi perempuan dengan peran politik yang mereka jalankan.

Dengan adanya persoalan tersebut menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan sistem demokrasi di Indonesia yang menganut mekanisme perwakilan. Dalam sistem politik Indonesia saat ini, keterlibatan rakyat tidak dapat dipisahkan dari mekanisme perwakilan yang menjadi pokok dari penerapan demokrasi. Representasi merupakan esensi dari proses demokrasi, karena melalui hubungan antara pihak yang mewakili dan yang di wakili, seluruh proses politik, terkhusus dalam bidang legislatif, dapat berjalan secara lebih praktis dan efektif. Di negara yang menganut demokrasi, sistem pemerintahan dilakukan berdasarkan persetujuan terbanyak dari rakyat, dimana rakyat memiliki hak untuk secara langsung memilih anggota legislatif dan pemimpin eksekutif dalam pemilu. Pernyataan resmi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh keputusan rakyat yang paling mengetahui siapa yang layak menjadi pemimpin negara. Dengan demikian,

sebuah negara dapat dikatakan demokratis jika melaksanakan pemilihan umum yang rutin, bebas, adil dan kompetitif. Di samping itu, perwakilan rakyat dan pemimpin terpilih harus memenuhi komitmen serta janji politik yang mereka buat selama kampanye.

Dalam sistem demokrasi, badan legislatif memiliki fungsi sebagai wakil rakyat dan pengambil keputusan publik. Kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan pemilu, tetapi juga oleh sejauh mana berbagai kelompok masyarakat, termasuk perempuan, mendapatkan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam lembaga perwakilan rakyat. Kehadiran perempuan dalam politik menjadi elemen penting untuk menciptakan demokrasi yang adil dan inklusif, karena mereka tidak hanya berperan sebagai simbol, tetapi juga membawa perspektif dan pengalaman sosial yang unik dalam proses pembuatan kebijakan.

Untuk menjamin partisipasi perempuan, negara telah menetapkan dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur bahwa partai politik wajib menyertakan minimal 30% calon anggota perempuan dalam daftar calon DPR dan DPRD. Kebijakan afirmatif ini menunjukkan komitmen negara untuk mendorong demokrasi yang lebih inklusif dan setara. Meski demikian, dalam praktiknya, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih belum sepenuhnya mencapai proporsi ideal tersebut. (Sumber : Data KPU tentang pemilihan umum, 2017; diolah peneliti, 2026)

Keterwakilan perempuan yang rendah dalam lembaga legislatif berkaitan erat dengan faktor struktural dan budaya yang masih sangat kuat. Dari aspek struktural, sistem rekrutmen partai, cara pencalonan, dan distribusi sumber daya

politik sering kali memberi keuntungan lebih kepada laki-laki. Di sisi lain, dari perspektif budaya, masih ada anggapan bahwa politik adalah wilayah laki-laki, yang membuat perempuan sering dianggap kurang layak untuk menempati posisi penting dalam pemerintahan. Hal ini mengharuskan perempuan yang terjun ke dunia politik untuk berusaha lebih keras agar memperoleh pengakuan dan kepercayaan dari rakyat.

Fenomena keterwakilan perempuan yang rendah juga terlihat di tingkat daerah, khususnya di DPRD Provinsi Jawa Barat. Mengingat bahwa provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, dengan komposisi penduduk perempuan yang sangat signifikan. Berdasarkan data resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa kependudukan tahun 2024, jumlah penduduk Jawa Barat mencapai lebih dari 51 juta jiwa, dengan sekitar 25,3 juta di antaranya merupakan perempuan atau hampir setengah dari total populasi. Besarnya jumlah penduduk perempuan ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki potensi sosial dan politik yang sangat besar untuk terlibat dalam berbagai ranah publik, termasuk dalam bidang politik dan pemerintahan. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam struktur lembaga perwakilan rakyat di tingkat provinsi. (Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024).

Pada periode DPRD Provinsi Jawa Barat tahun 2024–2029, dari total 120 anggota legislatif yang dilantik, hanya sekitar 27 orang merupakan perempuan atau sekitar 22,5% dari keseluruhan anggota legislatif. Angka ini masih berada di bawah ketentuan kuota minimal 30% sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan tegas

politik di Indonesia. (Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu; Data DPRD Provinsi Jawa Barat, 2024; diolah peneliti)

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara besarnya jumlah penduduk perempuan dengan keterwakilan mereka dalam lembaga legislatif, yang sekaligus menegaskan bahwa persoalan representasi perempuan di Jawa Barat bukan hanya persoalan jumlah penduduk, tetapi juga menyangkut struktur politik, budaya politik, serta peluang aktual perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik.

Keberadaan perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam dunia politik. Hal ini ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, yang menekankan pentingnya keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan nasional, termasuk dalam ranah politik (Inpres No. 9 Tahun 2000). Namun demikian, meskipun secara normatif kebijakan tersebut telah memberikan ruang yang luas bagi perempuan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan masih belum optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan formal dan implementasi, sehingga kehadiran perempuan dalam politik tidak hanya menjadi persoalan kuantitas, tetapi juga bagaimana mereka mampu berperan aktif dan mempengaruhi kebijakan publik yang responsif gender.

Dalam era modern ini, banyak orang yang ingin menjadi seorang anggota legislatif, baik pria maupun wanita, maka tidak heran kini banyak kaum perempuan yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif, tak jarang juga ada yang berhasil mendapatkan kursi. Hal ini juga membuktikan bahwa peran

perempuan di dalam dunia politik harusnya sudah semakin berkembang di era modern seperti saat ini. Oleh karena itu, cara perempuan mempresentasikan diri di DPRD Jawa Barat tidak sekadar mengenai citra individu, tetapi juga merupakan bagian dari usaha untuk meningkatkan kehadiran perempuan dalam struktur politik di Jawa Barat.

Dengan masih minimnya jumlah perempuan di lembaga legislatif, muncul tantangan bagi perempuan anggota DPRD untuk menciptakan citra profesional sekaligus menjaga identitas pribadi mereka. Dalam hal ini, konsep dramaturgi dan presentasi diri menjadi penting untuk memahami cara perempuan legislatif menunjukkan berbagai peran yang mereka jalani, baik di ruang publik sebagai wakil rakyat maupun di ruang pribadi sebagai individu dengan kehidupan sosial dan keluarganya.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas keterwakilan perempuan dalam politik dan pentingnya partisipasi mereka, studi yang secara spesifik mengeksplorasi cara perempuan anggota legislatif mengelola presentasi diri mereka dalam kehidupan sehari-hari, baik di *front stage* maupun *back stage*, masih sangat terbatas. Sebagian besar literatur lebih menekankan aspek kuantitatif, seperti jumlah keterwakilan perempuan, peraturan kuota, atau hambatan struktural dan budaya, tanpa menggali secara kualitatif bagaimana perempuan mengelola citra diri, memainkan peran ganda, dan menavigasi ekspektasi sosial. Hal ini menjadi sangat penting mengingat kebijakan kuota minimal 30% perempuan di lembaga legislatif, yang meskipun telah ada, realisasinya di DPRD Jawa Barat masih belum optimal. Dengan meneliti strategi presentasi diri perempuan, baik di ruang publik

maupun privat atau pribadi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan contoh nyata dan inspirasi bagi perempuan lain untuk berpartisipasi lebih aktif, sekaligus menunjukkan bagaimana penyesuaian peran di *front stage* dan *back stage* dapat menjadi kunci untuk meningkatkan keterlibatan perempuan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan literatur, tetapi juga berpotensi untuk mendorong atau memotivasi peningkatan jumlah keterwakilan perempuan, mendukung pencapaian kuota 30%, bahkan memicu partisipasi yang lebih tinggi, sehingga perempuan dapat lebih terlihat dalam ranah politik. Berdasarkan pemaparan tersebut, inilah hal yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PRESENTASI DIRI ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DI PROVINSI JAWA BARAT.

1.2 Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1.2.1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka peneliti memfokuskan pada “Presentasi Diri Anggota Legislatif Perempuan Di DPRD Provinsi Jawa Barat”.

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

Untuk meneliti mengenai bagaimana Presentasi Diri Anggota Legislatif Perempuan di Provinsi Jawa Barat, maka dirumuskan beberapa pertanyaan :

1. Bagaimana panggung depan (*front stage*) anggota legislatif perempuan di Provinsi Jawa Barat ?
2. Bagaimana panggung belakang (*back stage*) anggota legislatif perempuan di Provinsi Jawa Barat ?

3. Bagaimana Presentasi diri anggota legislatif perempuan di Provinsi Jawa Barat ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis panggung depan (*front stage*) anggota legislatif perempuan di Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk menganalisis panggung belakang (*back stage*) anggota legislatif perempuan di Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk menganalisis presentasi diri anggota legislatif perempuan di Provinsi Jawa Barat.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu politik, sosiologi politik, dan studi gender. Secara khusus, penelitian ini menggunakan konsep dramaturgi untuk memahami perilaku politik perempuan, khususnya di lembaga legislatif. Dengan menekankan interaksi antara *front stage* dan *back stage*., penelitian ini memperluas pemahaman tentang cara perempuan membangun citra, serta peran mereka dalam sistem politik yang masih didominasi laki-laki.

1.3.2.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta kegunaan untuk berbagai pihak. Kegunaan praktis yang telah dirumuskan peneliti sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan pengalaman serta wawasan baru dalam memahami dinamika politik serta strategi anggota legislatif perempuan dalam menampilkan diri, baik di depan panggung (*front stage*) maupun belakang panggung (*back stage*).

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi yang ingin mengetahui presentasi diri politik perempuan, perilaku politik di lembaga legislatif khususnya perempuan. Serta sebagai bahan acuan literatur dramaturgi untuk mahasiswa atau mahasiswi yang akan meneliti tentang studi dramaturgi di masa mendatang.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini membantu memahami lebih dalam mengenai peran serta tantangan perempuan di lembaga legislatif supaya termotivasi mendorong untuk mendukung atau bahkan menjadi partisipasi politik perempuan serta menambah pemahaman mendalam presentasi diri anggota legislatif perempuan.